

OPTIMALISASI SADAR SAMPAH: PERAN CAMAT DI SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN

Mamat^{1)*}

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹⁾
*Email: profesi_kepamongprajaan@ipdn.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 20 Oktober 2022
Disetujui: 23 November 2022
Diterbitkan: 7 Desember 2022

Abstract

This research aims to describe in depth the role of the sub-district head in increasing public awareness regarding waste management in Serpong District, South Tangerang City. With a community-based approach, the focus is on encouraging community roles and partnerships in waste management efforts. This research uses a qualitative methodology with a case study approach. Data collection includes interviews, observations, focus group discussions, and observations of relevant literature. The data analysis technique used is descriptive, including data reduction, presentation and drawing conclusions, with validation and feasibility testing carried out through triangulation of data sources regarding the role of the sub-district head in increasing public awareness regarding waste management in Serpong District, South Tangerang City. The role of the sub-district head in Serpong District in increasing community cultural awareness regarding waste management can be increased through active supervision, a Human Relations approach, and providing role models, while recommendations involve coordination with related agencies, provision of waste management facilities and infrastructure, as well as implementation of a community-based model with principles 3R.

Keywords: Leadership, Waste Management, Community Based

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Camat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, fokusnya adalah mendorong peran serta dan kemitraan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan tinjauan literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, melibatkan reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi dan uji keandalan dilakukan melalui triangulasi sumber data mengenai peran Camat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Peran Camat di Kecamatan Serpong dalam meningkatkan kesadaran budaya masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat ditingkatkan melalui pengawasan aktif, pendekatan Human Relation, dan memberikan keteladanan, sementara rekomendasi melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta implementasi model berbasis masyarakat dengan prinsip 3R.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Pengelolaan Sampah, Berbasis Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi topik pembahasan yang selalu hangat dan perlu mendapatkan penyelesaian dari hulu ke hilir. Hal ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk setiap hari dan aktivitas manusia yang menghasilkan sampah selalu meningkat setiap harinya. Namun disisi lain pengolahan sampah masih sangat terbatas dan kurang sadarnya masyarakat memaknai sampah dapat mencemari lingkungan semakin memburuk, hilangnya nilai estetika lingkungan, serta pengendapan sungai yang dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kehidupan manusia seperti penyebaran penyakit dan banjir. Oleh karena itu perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terintegrasi yang di dukung oleh segenap lapisan, baik masyarakat, pengusaha maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Nuradhawati & Kristian, 2022)..

Sikap masyarakat dan pengusaha yang masih tidak peduli dengan keberadaan sampah harus diubah dari tidak peduli menjadi peduli. Begitu pula sikap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat selaku pengambil kebijakan terkait isu sampah sudah seharusnya lebih memaksimalkan pengawasan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah. Keberadaan sampah yang selalu bertambah sebagai akibat dari bertambahnya aktivitas konsumsi manusia seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya. Aktivitas masyarakat di sektor permukiman, perkantoran, pasar atau pertokoan merupakan salah satu komponen timbulnya permasalahan sampah dilingkungan tersebut dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume dan karakteristik sampah yang beragam.

Jika sampah dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan masalah seperti pencemaran lingkungan seperti bau busuk, penularan penyakit, dan mengurangi nilai keindahan lingkungan itu sendiri. Sebagian masyarakat memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berharga. Pemikiran tersebut adalah salah, karena sampah merupakan emas hitam yang perlu diolah dan dapat menghasilkan pundi-pundi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai jika kita mengetahui dan mau memanfaatkannya kembali.

Tugas dan peran pemerintah bukan saja melindungi alam dari kegiatan manusia yang berpengaruh negatif bagi pada kehidupan masyarakat, akan tetapi mereka lebih menekankan kepada upaya-upaya untuk memperbaiki alam beserta pengaruh lingkungannya dari limbah1. Tugas dan peran pemerintah ini sangat penting dalam penyelesaian permasalahan sampah dari pedesaan hingga perkotaan. Tugas dan peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang dimulai dari hulu ke hilir. Dari hulu adalah sejak sebelum suatu produk yang dihasilkan dan dapat digunakan oleh konsumen dapat berpotensi menjadi sampah. Hilir yaitu dimana fase produk yang dihasilkan produsen tersebut sudah digunakan oleh konsumen, dan sisa dari produk yang tidak digunakan tersebut menjadi sampah dan dikembalikan ke media lingkungan dengan aman. Pentingnya pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dimaksudkan agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Kristian & Sudrajat, 2022).

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Maka penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

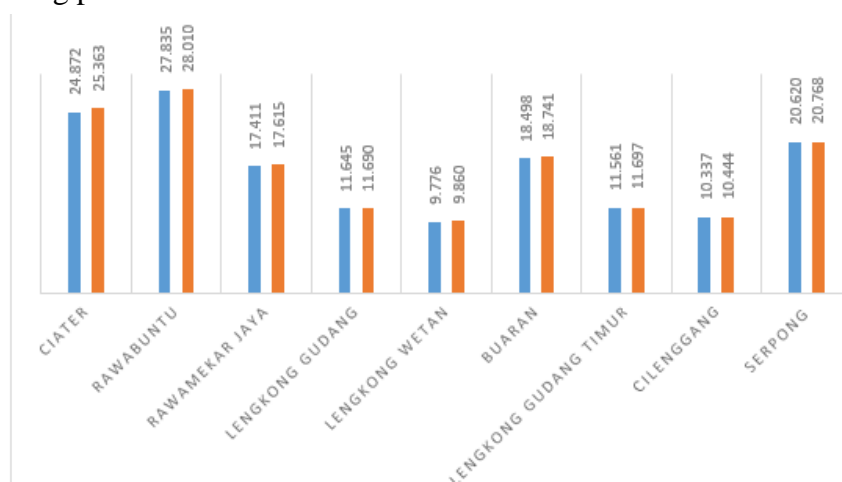
Kecamatan Serpong merupakan salah satu Kecamatan dari total 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 154.188 jiwa, yang dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan Pada Kecamatan Serpong

No	Kelurahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Pertumbuhan Penduduk	%
1	Ciater	24.872	25.363	491	0,30
2	Rawabuntu	27.835	28.010	175	0,11
3	Rawamekar Jaya	17.411	17.615	204	0,12
4	Lengkong Gudang	11.645	11.690	45	0,03
5	Lengkong Wetan	9.776	9.860	84	0,05
6	Buaran	18.498	18.741	243	0,15
7	Lengkong Gudang Timur	11.561	11.697	136	0,08
8	Cilenggang	10.337	10.444	107	0,07
9	Serpong	20.620	20.768	148	0,09
Jumlah		152.555	154.188	1.633	1,00

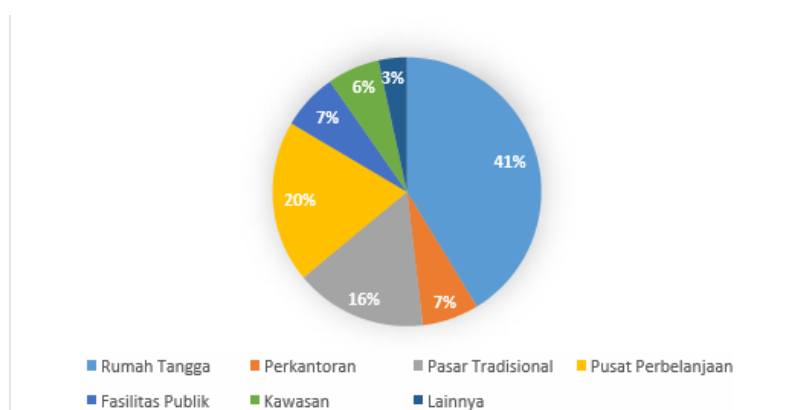
Sumber: Data Statistik Kecamatan Serpong, 2022

Berdasarkan data Tabel 1. diatas diketahui bahwa jumlah penduduk pada Kecamatan Serpong berjumlah 154.188 jiwa dengan pertumbuhan penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Ciater yaitu sebanyak 491 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil berada pada Kelurahan Lengkong Gudang yaitu sebanyak 45 jiwa. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan data jumlah penduduk berdasarkan Kelurahan pada Kecamatan Serpong dalam grafik batang pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Per-Kelurahan di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan
Sumber: Data Statistik Kecamatan Serpong, 2022

Pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Serpong, bertambahnya urbanisasi dan meningkatnya standar hidup karena inovasi teknologi telah berkontribusi terhadap penambahan jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan. Komposisi sampah yang dihasilkan tersebut berasal dari rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, fasilitas publik, kawasan dan lainnya. Komposisi asal sampah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah
Sumber: Data Statistik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Tahun 2022

Berdasarkan data pada Gambar 2. diatas dapat diasumsikan bahwa rumah tangga menyumbang sampah terbesar yaitu 41%, menyusul pusat perbelanjaan yaitu 20%, pasar tradisional yaitu 16%, perkantoran dan fasilitas publik yaitu 7%, terakhir adalah kawasan yaitu 6% dan lainnya yaitu 3%. Sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber sampah yang cukup besar peranannya dalam pencemaran lingkungan. Keberadaan sampah rumah tangga dalam lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Mensikapi kondisi tersebut tentunya Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Kecamatan Serpong perlu segera melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan sampah di wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, bahwa timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 mencapai 4.763.649 M2 per hari3. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Timbulan Sampah di Kota Tangerang Selatan, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m2/hari)
Pondok Aren	333.025	950.188
Ciputat Timur	188.293	832.152
Ciputat	206.559	779.036
Serpong Utara	144.733	472.143
Pamulang	306.327	926.581
Setu	73.069	230.169
Serpong	153.164	578.375
Jumlah	1.405.170	4.768.644

Sumber: Data Statistik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 2021

Berdasarkan data diatas dapat diasumsikan bahwa setiap orang di wilayah Kota Tangerang Selatan menghasilkan sampah sebesar 3,39 liter per hari. Sampah yang dihasilkan tersebut tidak seluruhnya terangkut ke TPA Cipeucang. Berdasarkan hasil pengamatan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menunjukan bahwa sampah yang terangkut sekitar $\pm 2.638.101$ M2 per hari atau baru sekitar 55,32% dari seluruh timbulan sampah yang ada. Data volume sampah di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkiraan Volume Sampah Terangkut per Hari di Kota Tangerang Selatan

Uraian	Persentase Volume Sampah %	Jumlah Volume Sampah M ² per Hari
Pengangkutan Sampah (Ton per Hari)	30,94	1.475.448
Pengangkutan Sampah Swasta (Ton per Hari)	24,38	1.162.653
Jumlah Sampah Terangkut	55,32	2.638.101

Sumber: Data Statistik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 2021

Berdasarkan data Tabel – 3 tersebut diatas dapat diasumsikan bahwa sampah yang dapat terangkut ke TPA sebanyak 2.638.101 M² per hari atau 55,32% per hari dari total ketersediaan sampah sebanyak 4.768.644. Hal ini berarti masih ada timbulan sampah yang tidak terangkut sebanyak 2.130.543 atau 44,68%. Akibatnya ada sampah yang tidak terangkut. Masyarakat melakukan pembakaran sampah, pembuangan sampah pada lahan kosong (TPS liar) dan pembuangan ke saluran air atau selokan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan daya angkut armada truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan.

Mengurangi kendala hal tersebut diatas, maka diperlukan perubahan paradigma pengelolaan persampahan yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan melakukan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang ke TPA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yakni meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemampuan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengupayakan Kota Tangerang Selatan bersih dan bebas dari sampah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk membangun lingkungan bersih dan bebas sampah diperlukan adanya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi”. Ketidakpedulian masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan berakibat pada lingkungan yang kurang bersih dan kurang sehat. Kebiasaan masyarakat membuang sampah pada saluran air (got) serta kurangnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga dalam bentuk kegiatan industri rumah tangga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di setiap tempat sampah rumah tangga hingga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Kurangnya masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan lingkungan bersih dan sehat yang terbebas dari sampah serta pelestarian lingkungan hidup, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dipinggir jalan dan ke sungai tentunya hal ini menandai bahwa masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup bukan saja tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat. Permasalahan sampah di Kecamatan Serpong bukan hanya disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk saja, namun juga disebabkan dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan keterbatasan kemampuan daya angkut sampah dalam pelayanan persampahan yang berakibat pada penanganan sampah yang tidak tuntas sehingga menimbulkan timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Untuk itu dibutuhkan evaluasi pengelolaan persampahan, dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Disamping itu, dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Untuk dapat mencapai pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya, diperlukan kesadaran dan kemandirian masyarakat hingga tercapainya sistem pengelolaan sampah yang baik dan tidak merusak lingkungan. Konsep pendekatan seperti ini menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan yang bersifat mendorong peran serta dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di samping itu, peran serta masyarakat itu sendiri merupakan wujud dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat bersumber dari kesadaran budaya masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk turut terlibat dalam setiap tahapan pembangunan daerah yang bersih, sehat dan terbebas dari sampah rumah tangga. Dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengembangkan sumber daya dan sumber dana dalam menumbuhkan kesadaran budaya masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan sejahtera berkat adanya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Camat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, fokusnya adalah mendorong peran serta dan kemitraan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Kesadaran budaya menjadi landasan peningkatan kapasitas masyarakat, memotivasi keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah yang bersih dan sehat. Peran Camat dianggap krusial sebagai pemangku kepentingan utama dalam mengembangkan kemitraan, memfasilitasi sumber daya, dan menciptakan lingkungan bersih, sehat, serta sejahtera melalui pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Green Leadership

Menurut Arici & Uysal (2022) *Green leadership* adalah pendekatan kepemimpinan yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui penerapan kebijakan, praktik, dan keputusan yang berkelanjutan. Pemimpin hijau berkomitmen untuk menjalankan organisasi atau tim dengan memperhatikan dampak ekologis, serta mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di antara anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Kepemimpinan hijau menggabungkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dengan visi jangka panjang yang memperhitungkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Indikator *Green Leadership* yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Lingkungan:
2. Efisiensi Energi:
3. Daur Ulang dan Pengelolaan Sampah:
4. Pengurangan Jejak Karbon:
5. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:
6. Inovasi Berkelanjutan:
7. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:
8. Keterlibatan dalam Proyek-Proyek Hijau:
9. Pelaporan Transparan tentang Kinerja Lingkungan.
10. Integrasi Prinsip-Prinsip Hijau dalam Pengambilan Keputusan:

Partisipasi Masyarakat

Menurut Pirnanda (2021) partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan dan kontribusi aktif warga dalam kegiatan atau proses yang terkait dengan kehidupan masyarakat atau pembangunan. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, kegiatan sosial, proyek pembangunan, dan lainnya. Partisipasi

masyarakat dianggap penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan demokrasi. Berikut adalah lima indikator partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:
2. Partisipasi dalam Inisiatif Lingkungan:
3. Partisipasi dalam Inisiatif Pembangunan Lokal:
4. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Budaya:
5. Partisipasi dalam Komunitas dan Pertukaran Informasi.

Pengelolaan Sampah

Meurut Mukhit et al (2019) pengelolaan sampah merujuk pada serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pemindahan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah dapat melibatkan berbagai strategi, seperti pengurangan, daur ulang, komposisi, dan pemusnahan yang aman. Indikator Pengelolaan Sampah:

1. Tingkat Pengurangan Sampah:
2. Tingkat Pemilahan Sampah:
3. Tingkat Daur Ulang:
4. Metode Pembuangan Akhir yang Aman:
5. Pengelolaan Sampah Berbahaya:
6. Partisipasi Masyarakat:
7. Efisiensi Energi dalam Pengelolaan Sampah:
8. Inovasi dan Teknologi.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat terbatas. (Creswell, 2016) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan dokumentasi. Ada pun informan dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel *purposive sampling* dengan informan yang memiliki kaitan mengenai peran camat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Camat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

Tugas dan peran Camat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa pelaksanaan tugas atributif yang dilakukan Camat terkait peran Camat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah meliputi:

- a. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, camat selaku pemimpin Kecamatan maka Camat tampil selaku pemimpin dalam memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat ini penting untuk dilakukan oleh Camat, karena dengan masyarakat diberdayakan maka akan menimbulkan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat agar mencapai kemandirian, meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Pada Tahap ini, Camat Serpong selaku pihak mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat berusaha untuk menciptakan pra kondisi pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kecamatan Serpong dapat memfasilitasi keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat secara efektif, dengan cara berkoordinasi dengan:

- Instansi Pemerintah yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
- Lurah terkait penganggaran pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendataan;
- Tokoh Masyarakat, terkait mencermati perkembangan dan mencari masukan; dan
- Pengusaha, terkait penyaluran hasil produksi pengolahan sampah, penyokongan bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari program Corporate Social Responsibility (CSR), seperti transformasi teknologi, permodalan dan pemasaran produk.
- Tujuan tahap penyadaran ini dimaksudkan agar komunikasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan dapat menumbuhkembangkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga masyarakat dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi- kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.

Guna mewujudkan tahapan tersebut diatas, maka perlu dilakukan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu kepada masyarakat selaku subjek pembangunan. Dalam pelaksanaan sosialisasi, pemerintah kecamatan Serpong berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi ini dilakukan di Aula kantor kecamatan dengan mengundang para Lurah dan tokoh masyarakat (Ketua RT dan RW), serta para kader PKK. Pesan yang tersampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah para tokoh masyarakat (Ketua RT dan RW), serta para kader PKK dapat menindaklanjuti hasil sosialisasi ini kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat juga turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran budaya masyarakat tentang pengelolaan sampah bagi kebersihan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat

NO	TAHAPAN JANGKA PENDEK	HASIL (OUTPUT)
1	Melakukan Koordinasi dengan Narasumber	Tercapainya koordinasi dengan Instansi terkait
2	Pembentukan Tim	Terbentuknya Tim Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing Kelurahan, dan RT
3	Koordinasi Internal Tim	Terlaksananya koordinasi internal tingkat RT dan Kelurahan
4	Penyusunan SK Tim Kerja	Terbitnya SK Tim Kerja
5	Pemantapan SK Tim Kerja	Pengesahan SK TIM

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Peran camat menjadi elemen sentral dalam menggerakkan inisiatif berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Melalui koordinasi yang efektif dengan narasumber dan instansi terkait, camat berhasil mendorong pembentukan Tim Pemberdayaan Masyarakat di setiap kelurahan dan RT. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keterlibatan camat dalam aksi nyata, tetapi juga menegaskan komitmen awalnya terhadap perubahan lingkungan di tingkat lokal.

Seiring perjalanan ini, camat menghadirkan koordinasi internal tim di tingkat RT dan kelurahan, yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja sebagai tonggak penting. Pengesahan SK tersebut bukan hanya bentuk legitimasi, melainkan juga fondasi formal bagi upaya berkelanjutan camat dalam menanggulangi masalah pengelolaan sampah di wilayahnya. Camat menerbitkan pemantapan SK Tim Kerja yang mendapat pengesahan dan penetapan resmi. Keberhasilan ini menandai pencapaian yang signifikan dan kematangan inisiatif camat dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di kecamatan tersebut. Berdasarkan observasi secara partisipatoris terlihat peran camat sebagai pemimpin proaktif dan efektif dalam mengawal keberlanjutan, merangsang kesadaran lingkungan, dan membangun dasar yang kuat untuk program-program berkelanjutan di masa mendatang.

Hambatan-Hambatan Camat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

Faktor pendukung dan penghambat yang memainkan peran kunci dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengelola sampah secara berkelanjutan. Faktor pendukung pertama yang patut dicermati adalah kegigihan luar biasa yang ditunjukkan oleh para pengelola dan pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah, termasuk operasional bank sampah dan program TPS-3R. Dengan komitmen yang tak

tergoyahkan, mereka berhasil melibatkan masyarakat melalui kegiatan produktif seperti tabungan sampah, menciptakan dasar yang kuat untuk transformasi perilaku.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat membentuk pilar utama dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Harapan untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sadar akan manfaat positif yang dihasilkan oleh inisiatif ini mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran ini, yang didorong oleh pemahaman akan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan, menjadi katalisator untuk perubahan perilaku.

Namun, seperti pada banyak inisiatif berkelanjutan, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi. Beberapa masyarakat menunjukkan kurangnya minat terhadap kegiatan bank sampah karena kesibukan dalam rutinitas harian mereka. Lebih lanjut, rasa jenuh muncul ketika hasil dari pemilahan sampah tidak langsung memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Faktor ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi kelangsungan program pengelolaan sampah.

Selain itu, kendala keuangan, khususnya kekurangan modal oleh bank sampah, menjadi faktor penghambat serius yang dapat mengurangi semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini. Solusi strategis yang cermat perlu dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut dan menjaga semangat serta partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai faktor ini, upaya bersama dan dukungan penuh dari pihak berkepentingan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dan potensi mitra usaha, sangat diperlukan. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika faktor pendukung dan penghambat ini menjadi kunci untuk merancang strategi yang efektif guna mencapai tujuan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Solusi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, solusi-solusi yang telah diidentifikasi membawa dimensi yang signifikan dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah ini. Sebagai contoh konkret, peran Camat Serpong menjadi sentral dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat Serpong mencerminkan kesungguhan dan keterlibatannya dalam mengoptimalkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengecekan langsung ke lokasi kegiatan, Camat Serpong berada di garis depan untuk mendengarkan dan melihat secara langsung proses kegiatan, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Dalam konteks *Human Relation*, Camat Serpong memainkan peran kunci dalam merangsang motivasi masyarakat. Penghargaan yang diberikan bagi masyarakat atau kelompok yang berhasil dalam kegiatan pemberdayaan menjadi insentif positif yang diarahkan untuk merangsang rasa kepuasan diri mereka. Dalam konteks ini, Camat Serpong juga dapat mempertimbangkan solusi pemberian modal sebagai strategi untuk meningkatkan hasil kerja dan produksi yang sukses, memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Dalam pemenuhan kebutuhan, penilaian kelayakan yang cermat oleh Camat Serpong menjadi penting, dan pendekatan pembinaan tanpa pemaksaan intervensi membantu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat. Penghargaan dan perhatian terhadap keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan juga menjadi faktor penting yang dijaga oleh Camat Serpong. Terakhir, dalam peran keteladanan, Camat Serpong menjadi figur yang dapat dijadikan teladan oleh masyarakat. Melibatkan diri secara langsung dalam tugas-tugas terkait pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah rumah tangga, bukan hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga merangsang semangat partisipasi masyarakat dalam inisiatif ini. Dengan merangkum temuan ini dalam konteks Camat Serpong di Kota Tangerang

Selatan, penelitian ini menggambarkan bahwa peran pemimpin lokal memiliki dampak signifikan dalam menggerakkan dan mengelola inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesadaran budaya yang lebih tinggi terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

E. SIMPULAN

Dalam penelitian ini, peran Camat Serpong di Kota Tangerang Selatan dalam memimpin upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah memainkan peran sentral. Pengawasan yang teliti, pendekatan Human Relation yang memotivasi, dan keteladanan yang dijunjung tinggi menciptakan dasar yang kokoh untuk meningkatkan kesadaran budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah. Solusi-solusi praktis seperti penghargaan, pemberian modal, dan pemenuhan kebutuhan dengan pendekatan yang bijaksana mewarnai upaya ini. Upaya untuk meningkatkan kesadaran budaya masyarakat Serpong terkait pengelolaan sampah mencakup penguatan kolaborasi, pelaksanaan program edukasi berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya untuk bank sampah, dan penetapan kebijakan pro-lingkungan. Kolaborasi yang lebih erat antara Camat Serpong, instansi terkait, dan sektor swasta diharapkan akan memperkaya sumber daya dan pengetahuan. Program edukasi yang berkesinambungan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, dukungan untuk bank sampah, dan kebijakan pro-lingkungan diharapkan dapat merangsang perubahan positif dalam perilaku masyarakat Serpong terkait pengelolaan sampah. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Serpong akan mengalami peningkatan signifikan dalam kesadaran budaya mereka seputar pengelolaan sampah, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- A.G, Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar
- Arici, H. E., & Uysal, M. (2022). Leadership, green innovation, and green creativity: A systematic review. *The Service Industries Journal*, 42(5-6), 280-320.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Hasan, I. 2006. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi : Konsep, Strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPASI, 2003, h.3
- Kristian, I., & Sudrajat, Y. (2022). ADMINISTRASI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KINERJA UMKM OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN SUBANG. *VISIONER*, 4(1 JUNI), 9-19.
- Levinson dan Soekanto, 2009:213, Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukhit, A., Syafrudin, S., & Muhammad, F. (2019). STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN PERSAMPAHAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.
- Narwoko, J Dwi & Suyanto Bagong. (2004). *Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nuradhawati, R., & Kristian, I. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 29-42.
- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES
- Rahardjo Adisasmita, "Pembangunan Ekonomi Perkotaan", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, hal.155)
- Pirnanda, H. A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bebas Infrastruktur Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 175-189.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008, h.7
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta :Media Presindo, 2007